YASIN
Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya

p-ISSN: 2808-2346
e-ISSN: 2808-1854

Terindeks: SINTA 5, Copernicus, Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/yasin.v6i2.9671

PERAN PEMERINTAH NAGARI DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI NAGARI TANJUNG BARULAK, KECAMATAN BATIPUH, KABUPATEN TANAH DATAR

The Role of the Nagari Government in Physical Development in Nagari Tanjung Barulak, Batipuh District, Tanah Datar Regency

Fikra Ridhatul Hasanah & Sinta Westika Putri
Universitas Negeri Padang
fikraridhatul@gmail.com; sintawestika@fis.unp.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 7, 2026	Apr 4, 2026	Apr 16, 2026	Apr 21, 2026

Abstract

Physical development at the *nagari* level is the spearhead of regional development in West Sumatra, but the role of the *nagari* government in this process has its own distinctiveness because it cannot be separated from the customary system that is strongly rooted in community life. This study aims to examine the role of the Tanjung Barulak *Nagari* Government in physical development and to identify the factors that influence it. This study employed a descriptive qualitative approach involving 21 informants selected purposively, including *nagari* officials, *jorong* heads, representatives of BPRN, KAN, and the community. Data were collected through in-depth interviews and documentation studies, and were then analyzed using the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the Tanjung Barulak *Nagari* Government had carried out five roles according to Siagian, namely stabilizer, innovator, modernizer, pioneer, and implementer, which were manifested through tiered deliberation, innovation in budget and irrigation management, the implementation of RPJM, budget transparency, and a self-management system based on TPK. The most

Yasin Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

dominant roles were those of stabilizer and implementer, while the roles of innovator, modernizer, and pioneer still need to be strengthened, especially in the use of technology and in increasing public awareness of maintaining development outcomes. Development implementation was supported by the synergy of *tungku tigo sajarangan*, the spirit of *gotong royong*, and the technical support of the regency government, but was hindered by delays in fund disbursement, customary land constraints, low awareness of infrastructure maintenance, and the central government's budget efficiency policy. These findings affirm that strengthening the role of the *nagari* government in physical development requires more adaptive strategies through optimizing alternative funding schemes and integrating customary values into *nagari* development policies.

Keywords: Role of the *Nagari* Government; Physical Development; Local Governance; Infrastructure; Customary-Based Development

Abstrak: Pembangunan fisik di tingkat nagari merupakan ujung tombak pembangunan daerah di Sumatera Barat, tetapi peran pemerintah nagari dalam proses tersebut memiliki kekhasan karena tidak terlepas dari sistem adat yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Pemerintah Nagari Tanjung Barulak dalam pembangunan fisik serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melibatkan 21 informan yang dipilih secara *purposive*, meliputi perangkat nagari, kepala jorong, perwakilan BPRN, KAN, dan masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari Tanjung Barulak telah menjalankan lima peran menurut Siagian, yaitu stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana, yang diwujudkan melalui musyawarah berjenjang, inovasi pengelolaan anggaran dan irigasi, penerapan RPJM, transparansi anggaran, serta sistem swakelola berbasis TPK. Peran yang paling dominan adalah stabilisator dan pelaksana, sedangkan peran inovator, modernisator, dan pelopor masih perlu diperkuat, terutama dalam pemanfaatan teknologi dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan hasil pembangunan. Pelaksanaan pembangunan didukung oleh sinergi *tungku tigo sajarangan*, semangat gotong royong, dan dukungan teknis pemerintah kabupaten, tetapi dihambat oleh keterlambatan pencairan dana, kendala lahan adat, rendahnya kesadaran pemeliharaan infrastruktur, dan kebijakan efisiensi anggaran pusat. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan peran pemerintah nagari dalam pembangunan fisik memerlukan strategi yang lebih adaptif melalui optimalisasi skema pendanaan alternatif dan pengintegrasian nilai adat dalam kebijakan pembangunan nagari.

Kata Kunci: Peran Pemerintah Nagari; Pembangunan Fisik; Tata Kelola Lokal; Infrastruktur; Pembangunan Berbasis Adat

PENDAHULUAN

Pemerintah nagari memegang peran yang sangat strategis sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pembangunan di tingkat lokal. Pembangunan fisik di tingkat nagari merupakan ujung tombak pembangunan daerah di Sumatera Barat, di mana setiap keputusan

dan langkah pembangunan tidak dapat dilepaskan dari sistem adat yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Menurut (Siagian, 2014), peran pemerintah dalam pembangunan mencakup lima fungsi utama, yaitu sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana langsung kegiatan pembangunan. Fungsi-fungsi tersebut menegaskan bahwa pemerintah nagari tidak semata-mata berperan administratif, melainkan juga menjadi motor penggerak pembangunan yang menyeimbangkan dimensi fisik, sosial, dan ekonomi masyarakat. Dalam konteks Provinsi Sumatera Barat, nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang berbasis pada filosofi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, sehingga peran pemerintah nagari dalam pembangunan menjadi sangat khas dan kompleks karena harus memadukan tuntutan modernisasi dengan nilai-nilai adat yang telah lama mengakar (Zakir, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah nagari diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat. Melalui kebijakan desentralisasi, nagari diharapkan menjadi subjek pembangunan yang mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan potensi lokal secara berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa menegaskan bahwa pembangunan nagari harus dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pemerintahan nagari yang terdiri dari Wali Nagari, perangkat nagari, Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus), dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) memiliki tanggung jawab bersama dalam memastikan pembangunan fisik berjalan secara efektif, merata, dan berkelanjutan (Zakir, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah nagari menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan fisik di tingkat lokal.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji peran pemerintah desa dalam pembangunan, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek pengelolaan dana desa dan mekanisme perencanaan partisipatif secara umum (Rachaju et al., 2022); (Simbolon et al., 2021). Studi-studi tersebut belum secara mendalam mengeksplorasi bagaimana kelima fungsi peran pemerintah nagari sebagaimana dikemukakan oleh Siagian dijalankan secara konkret dalam konteks pembangunan fisik di nagari yang memiliki sistem adat yang kuat. Selain itu, kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi peran pemerintah nagari dalam pembangunan fisik, khususnya dalam konteks sistem pemerintahan sumatera barat yang sejalan dengan adat, juga masih sangat terbatas. Kesenjangan inilah yang mendorong perlunya

penelitian yang secara spesifik mengkaji peran pemerintah nagari dalam pembangunan fisik beserta faktor-faktor penghambat dan pendukungnya.

Nagari Tanjung Barulak yang terdiri dari 11 jorong dengan karakteristik geografis dan kebutuhan infrastruktur yang beragam. Berbagai kondisi di lapangan mengindikasikan bahwa peran pemerintah Nagari Tanjung Barulak dalam pembangunan fisik belum berjalan secara optimal. Berdasarkan data awal, dari 11 jorong yang ada, hanya beberapa jorong yang mendapat alokasi pembangunan jalan pada periode 2023-2025. Kondisi infrastruktur jalan di beberapa jorong masih memprihatinkan dengan kerusakan fisik yang cukup parah, sistem irigasi pertanian yang belum berfungsi optimal, serta akses air bersih yang belum menjangkau seluruh wilayah nagari secara merata. Di sisi lain, infrastruktur yang telah dibangun pun kerap tidak bertahan lama akibat minimnya pemeliharaan oleh masyarakat. Meskipun Nagari Tanjung Barulak telah memiliki sistem perencanaan partisipatif melalui RPJM Nagari Tahun 2023-2029 dan Musrenbang, realisasi pembangunan fisik masih sangat terbatas dan belum mampu menjawab kebutuhan infrastruktur masyarakat secara menyeluruh. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana pemerintah nagari telah menjalankan perannya secara optimal dalam menggerakkan, mengoordinasikan, dan memastikan keberlanjutan pembangunan fisik di tengah berbagai keterbatasan yang ada.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis secara komprehensif kelima peran pemerintah nagari menurut (Siagian, 2014) dalam konteks pembangunan fisik yang diwarnai oleh sistem adat di Sumatera Barat. Landasan teori utama yang digunakan adalah teori peran pemerintah dalam pembangunan dari Siagian, yang mencakup fungsi stabilisator dalam menjaga kondisi sosial yang kondusif, inovator dalam menghadirkan gagasan baru, modernisator dalam mendorong transformasi tata kelola, pelopor dalam memberikan keteladanan, serta pelaksana dalam menggerakkan kegiatan pembangunan secara langsung. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih menyeluruh dan kontekstual mengenai sejauh mana pemerintah Nagari Tanjung Barulak telah menjalankan perannya, serta mengidentifikasi dimensi peran mana yang masih perlu diperkuat untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan fisik di seluruh jorong. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah Nagari Tanjung Barulak dalam pembangunan fisik berdasarkan teori Siagian, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi peran tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali secara mendalam fenomena peran pemerintah nagari dalam pembangunan fisik di Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap realitas sosial yang kompleks dan kontekstual, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam proses pengumpulan data (Sugiyono, 2021). Informan penelitian berjumlah 21 orang yang ditentukan melalui teknik purposive sampling dan snowball sampling, terdiri atas perangkat nagari, kepala jorong, perwakilan BPRN, perwakilan KAN, dan masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan nagari, dengan pembatasan informan dilakukan setelah tercapainya saturasi data.

Data dikumpulkan melalui dua sumber, yaitu data primer berupa wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan rumusan masalah (Lexy J Moleong, 2019), serta data sekunder berupa dokumen profil nagari, laporan kegiatan pembangunan, dan peraturan nagari yang relevan. Proses pengumpulan data di lapangan dilakukan sejak bulan Februari sampai Maret 2026 yang didukung oleh alat bantu berupa buku catatan, perekam suara, dan kamera sebagai dokumentasi visual. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber berlatar belakang berbeda, seperti wali nagari, kepala jorong, tokoh masyarakat, serta anggota BPRN dan KAN (Abdussamad, 2021). Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, guna menghasilkan temuan yang kredibel dan mampu menjawab rumusan masalah penelitian secara mendalam.

HASIL

Peran Pemerintah Nagari Tanjung Barulak dalam Pembangunan Fisik Nagari

Penelitian ini mengkaji peran pemerintah nagari dalam pembangunan fisik di Nagari Tanjung Barulak berdasarkan lima indikator peran pemerintah menurut Siagian, yaitu stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana.

1. Peran sebagai Stabilisator

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Nagari Tanjung Barulak telah menjalankan peran stabilisator melalui mekanisme musyawarah berjenjang, mulai dari tingkat

jorong hingga Musrenbang Nagari. Seluruh kepala jorong, perwakilan BPRN, KAN, dan tokoh masyarakat dilibatkan dalam setiap tahap perencanaan pembangunan. Keputusan pembangunan tidak dibuat secara sepihak, melainkan merupakan hasil musyawarah yang menggunakan sistem perangkingan untuk menentukan prioritas berdasarkan urgensi kebutuhan. Sebagaimana disampaikan oleh perangkat nagari:

"...Solusi awalnya adalah melalui perencanaan yang baik dan adanya sosialisasi penjelasan ke masyarakat. Selain itu, komunikasi menjadi faktor penting agar tidak terjadi permasalahan. Melibatkan masyarakat sebagai pekerja di lokasi kegiatan juga menjadi salah satu cara untuk mencegah konflik." (Wawancara 12 Maret 2026)

Hasil musyawarah tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) secara bertahap. Tidak ada ketegangan sosial atau konflik yang tercatat selama periode penelitian, yang menunjukkan mekanisme tersebut dalam menjaga stabilitas pembangunan.

2. Peran sebagai Inovator

Terdapat tiga bentuk inovasi yang ditemukan dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Nagari Tanjung Barulak. Pertama, inovasi teknis berupa pembangunan bendungan irigasi untuk mengairi lahan sawah yang sebelumnya tidak produktif. Bapak wettry Nur, Kasi Kesejahteraan Nagari Tanjung Barulak menyatakan bahwa:

"*inovasi atau gagasan baru berupa pembangunan bendungan untuk irigasi. Awalnya ada lahan sawah yang tidak bisa diairi, kemudian dibuat bendungan sehingga air bisa ditampung dan dialirkan. Hasilnya, lahan yang sebelumnya tidak digarap kini bisa dimanfaatkan oleh petani".*(Wawancara, 12 aret 2026)

Kedua, inovasi manajemen anggaran melalui sistem kombinasi dana nagari dengan swadaya masyarakat, di mana alokasi untuk upah tenaga kerja dialihkan untuk pembelian bahan bangunan agar jangkauan fisik pembangunan menjadi lebih luas dengan dana yang sama. Ketiga, inovasi pemanfaatan sisa anggaran secara optimal dengan memperpanjang hasil pembangunan agar tidak ada dana yang terbuang. Sebagaimana disampaikan oleh informan:

"pembangunan di jorong sebagian besar pembangunan dilakukan dengan sistem swadaya. Dari total dana sekitar Rp300.000.000, alokasi upah kerja sebagian dialihkan untuk membeli bahan agar pembangunan jalan bisa lebih panjang." (Wawancara, 12 Maret 2026)

3. Peran sebagai Modernisator

Modernisasi tata kelola pembangunan diwujudkan melalui penerapan dokumen perencanaan terstruktur berupa RPJM Nagari dan RKP Nagari, penyusunan RAB berbasis survei lapangan, keterlibatan tenaga ahli eksternal sebagai perencana dan pengawas teknis, serta sistem transparansi anggaran melalui baliho dan papan informasi di masing-masing jorong. Sebelum pembangunan dimulai, dilakukan mekanisme pra-kegiatan berupa pengumuman yang ditempelkan di warung-warung jorong dan pendirian plang di lokasi kegiatan. Perangkat nagari menyatakan:

"Setiap tahun pemerintah nagari menyampaikan realisasi penggunaan anggaran melalui baliho atau papan informasi di masing-masing jorong, sehingga masyarakat dapat mengetahui penggunaan dana." (Wawancara, 18 Februari 2026)

4. Peran sebagai Pelopor

Pemerintah nagari menjalankan peran pelopor melalui keterlibatan langsung aparatur nagari di lapangan sejak tahap survei, penyusunan RAB, pelaksanaan, hingga monitoring berkala. Pemantauan dilakukan setiap hari atau minimal sekali seminggu, dan evaluasi formal dilaksanakan saat pekerjaan mencapai 50 persen dengan melibatkan tim nagari, pihak kecamatan, dan pendamping desa. Sebelum pelaksanaan fisik dimulai, dilakukan kegiatan gotong royong bersih-bersih sebagai wujud penggerak partisipasi awal masyarakat. Mobilisasi partisipasi masyarakat dilakukan melalui pendekatan berbasis tokoh dengan melibatkan niniak mamak dan kepala jorong.

5. Peran sebagai Pelaksana

Pelaksanaan pembangunan dilakukan secara swakelola oleh masyarakat melalui Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan Kepala Jorong sebagai ketua atau anggota, sementara pemerintah nagari berposisi sebagai fasilitator, pengelola anggaran, dan pengawas. Sumber dana pembangunan berasal dari kombinasi APBN, APBD, SiLPA nagari, dana Pokir DPRD, dan swadaya masyarakat. Tabel 1 berikut ini menyajikan realisasi pembangunan fisik selama periode 2023 hingga 2025.

Tabel 1. Realisasi Pembangunan Fisik Sejak Tahun 2023 Sampai 2025

No	Tahun	Jenis Pembangunan	Lokasi/Keterangan
1	2023	Pembangunan jalan Gantiang Larak	Baliak Baringin
2	2023	Pembangunan irigasi	Putaran (Guguak Tinggi)

Tabel 1. Realisasi Pembangunan Fisik Sejak Tahun 2023 Sampai 2025			
No	**Tahun**	**Jenis Pembangunan**	**Lokasi/Keterangan**
3	2023	Pembangunan jalan Ujuang Darek–Kapuah	Kapuah
4	2023	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Pulai, Koto, Padang Langgo, Tabuah-Tabuah
5	2023	Pembangunan jalan Kubang Sirauik Pecaturan	Kapuah
6	2024	Pembangunan jalan lingkar Guguk Tinggi–Guguk Tapuang	Guguk Tinggi-Gusuk Tapuang
7	2024	Lanjutan pembangunan jalan Ujuang Darek	Kapuah
8	2024	Pembangunan MCK	Putek (Kapalo Koto)
9	2025	Pembangunan jalan usaha tani	Guguk Tinggi
10	2025	Rehabilitasi pasar nagari	Tanjung Barulak
11	2025	Pembangunan jalan Usaha Tani Aia Bareh	Koto
12	2025	Pembangunan jembatan Surau Balai	Guguk Tinggi
13	2025	Pembangunan jalan Guguk Payo	Guguk Tinggi
14	2025	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Padang Langgo, Koto

Sumber: Hasil olahan peneliti

Ketua BPRN turut mengonfirmasi bahwa seluruh pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah nagari telah berjalan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. Dari temuan wawancara dapat diketahui bahwa peran pemerintah nagari sebagai pelaksana pembangunan di Nagari Tanjuang Barulak tidak bersifat dominatif, melainkan partisipatif. Pemerintah nagari tidak menempatkan diri sebagai aktor tunggal yang menjalankan pembangunan, tetapi justru mendorong keterlibatan aktif masyarakat melalui mekanisme swakelola. Pola ini mencerminkan prinsip good governance, di mana transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat menjadi landasan dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penyusunan RAB, hingga pelaksanaan di lapangan.

Terkait pemerataan, ditemukan bahwa pemerintah nagari telah menggeser paradigma dari sistem bagi rata ke sistem berbasis prioritas kebutuhan. Mekanisme yang diterapkan adalah rotasi pembangunan sekitar tiga jorong per tahun berdasarkan hasil Musrenbang. Dari 11 jorong yang ada, selama periode 2023-2025 baru sekitar empat jorong yang mendapatkan pembangunan jalan, sementara jorong-jorong lainnya mendapatkan jenis pembangunan fisik lainnya atau menunggu giliran sesuai prioritas. Meskipun secara prosedural sistem pembangunan nagari berjalan dengan baik, terdapat beberapa temuan yang tidak sesuai dengan pola umum. Pertama, pada tahun 2026 seluruh program pembangunan fisik yang telah direncanakan untuk tiga jorong yaitunya Baliak Baringin, Pulai, dan Palembaian terpaksa

ditangguhkan sepenuhnya akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Kedua, meskipun infrastruktur telah dibangun, kesadaran pemeliharaan masyarakat masih rendah. Seorang informan dari masyarakat menyebutkan bahwa tiang pembatas jalan yang dipasang untuk mencegah kendaraan berat sudah dirusak dan hilang. Ketiga, program Pamsimas untuk akses air bersih di Jorong Guguak Tapuang dan Jorong Padang Langgo yang telah tercantum dalam RPJM belum terealisasi hingga saat penelitian dilakukan.

Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peran Pemerintah Nagari dalam Pembangunan Fisik

Pelaksanaan peran pemerintah nagari dalam pembangunan fisik dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat mendukung maupun menghambat.

1. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil wawancara, faktor pendukung dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan eksternal. Dalam faktor internal, sinergi kelembagaan 'tungku tigo sajarangan' yang memadukan unsur pemerintahan modern dengan lembaga adat Minangkabau menjadi kekuatan internal utama dalam pelaksanaan pembangunan nagari. Sinergi ini menghasilkan legitimasi ganda, baik secara formal administratif maupun sosial-budaya, sehingga kebijakan pembangunan lebih mudah diterima dan diimplementasikan oleh masyarakat. Temuan ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Perangkat nagari, bapak Wettry Nur menjelaskan bahwa:

"*...Faktor yang membantu ada internal dan eksternal. Faktor internal adalah adanya tungku tigo sajarangan, yaitu Wali Nagari, KAN, dan BPN. Ini menjadi alat dalam pelaksanaan kegiatan nagari dan penyelesaian masalah. Faktor eksternal adalah dukungan dari instansi seperti PMD/PPKB di tingkat kabupaten.*"(Wawancara 12 Maret 2026)

Selain institusi adat, partisipasi aktif masyarakat dalam bentuk gotong royong menjadi faktor pendukung yang sangat signifikan. Kepala Jorong menyebutkan bahwa masyarakat yang kooperatif dan bersemangat bergotong royong terbukti mampu memaksimalkan hasil pembangunan meskipun dengan anggaran yang terbatas. Dukungan ninik mamak, ketersediaan bahan lokal, dan kondisi sosial masyarakat yang kondusif juga turut menjadi faktor pendukung penting. Masyarakat di tingkat jorong pun juga mengonfirmasi semangat gotong royong solidaritas masyarakat nagari termasuk jaringan perantau mampu menjadi

penyangga ketika anggaran formal tidak mencukupi, sehingga pembangunan tetap dapat berjalan. Ilham Aldes menambahkan bahwa faktor pendukung lainnya meliputi keberadaan perencana kegiatan yang kompeten, antusiasme masyarakat dalam berpartisipasi, dan ketersediaan RAB kegiatan yang terstruktur.

2. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaannya, proses pembangunan di Nagari Tanjuang Barulak tidak terlepas dari berbagai kendala yang bersifat teknis maupun non-teknis. Lebih lanjut, Bapak Wettry Nur merinci hambatan yang dihadapi tersebut:

"...*Faktor penghambat utama adalah keterlambatan atau keterbatasan pencairan dana ke nagari. Selain itu, ada juga kendala dalam pembebasan lahan, terutama di daerah tertentu, sehingga pembangunan agak sulit dilakukan. Di sinilah diperlukan peran 'tungku tigo sajarangan' untuk membantu menyelesaikan kendala tersebut."(*Wawancara 12 Maret 2026)

Ketua KAN membenarkan bahwa meskipun konflik pembebasan lahan yang parah belum pernah terjadi, persoalan tanah pusaka adat tetap menjadi potensi hambatan yang perlu diantisipasi. Selama ini, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah kekeluargaan yang melibatkan KAN. Selain itu bapak Ilham Aldes menyebutkan bahwa hambatan teknis yang paling sering dirasakan adalah faktor cuaca. Hujan yang terus-menerus dapat memperlambat pelaksanaan pekerjaan secara signifikan. Lebih lanjut, pada tahun 2026, pembangunan fisik tidak dapat dilaksanakan sama sekali karena adanya pemotongan anggaran nagari akibat kebijakan efisiensi, sehingga seluruh program pembangunan fisik yang telah direncanakan terpaksa ditangguhkan.

Di samping itu, pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun masih menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah nagari mengakui bahwa kesadaran masyarakat dalam merawat infrastruktur belum merata. Kondisi ini juga diakui oleh masyarakat sendiri. Salah seorang informan menyebutkan bahwa jalan jorong yang seharusnya tidak boleh dilalui kendaraan beroda lebih dari empat sudah dilanggar, bahkan tiang pembatas yang dipasang sudah berani dirusak dan hilang. Kondisi geografis nagari yang berbukit dengan topografi yang beragam juga menambah kompleksitas dan biaya pembangunan infrastruktur penghubung antar jorong.

PEMBAHASAN

Pembahasan ini menganalisis temuan penelitian berdasarkan teori peran pemerintah menurut (Siagian, 2014) yang mencakup lima indikator: stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana. Analisis dilakukan untuk melihat sejauh mana pemerintah Nagari Tanjung Barulak telah menjalankan perannya dalam pembangunan fisik nagari serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi peran tersebut.

Peran Pemerintah Nagari Tanjung Barulak dalam Pembangunan Fisik Nagari

1. Peran Pemerintah Nagari sebagai Stabilisator

Dalam Siagin menyatakan bahwa peran stabilisator mengharuskan pemerintah menjaga keseimbangan dan ketertiban jalannya pembangunan, termasuk mencegah konflik yang dapat menghambat proses tersebut. Peran ini diwujudkan melalui kemampuan selektif, sosialisasi efektif, pendekatan persuasif, dan proses yang berkesinambungan. Pemerintah Nagari Tanjung Barulak telah menjalankan peran ini dengan baik melalui mekanisme musyawarah berjenjang dari tingkat jorong hingga Musrenbang Nagari. Setiap keputusan pembangunan merupakan hasil musyawarah yang melibatkan kepala jorong, BPRN, KAN, dan niniak mamak, sehingga tidak ada ketegangan sosial yang tercatat selama penelitian berlangsung.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Siagian bahwa stabilisator yang efektif bersifat proaktif dengan membangun sistem komunikasi dan partisipasi yang mencegah konflik sejak awal. Hal ini sejalan dengan (Pangkey, 2024) dan juga penelitian (Karinda et al., 2024) yang menegaskan bahwa pemerintah sebagai perantara harus mampu menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah di atasnya. Hal ini selaras dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang mengharuskan pembangunan desa dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan dan gotong royong.

2. Peran Pemerintah Nagari sebagai Inovator

Menurut Siagian, inovator mengharuskan pemerintah menghadirkan gagasan dan cara-cara baru yang lebih efektif dan efisien dalam proses pembangunan. Pemerintah Nagari Tanjung Barulak telah menjalankan peran ini, meskipun dalam skala yang relatif sederhana, melalui tiga bentuk inovasi nyata: Pertama, pembangunan bendungan irigasi sebagai solusi atas permasalahan pertanian yang memungkinkan lahan sawah tidak produktif dapat dialiri air secara optimal. Kedua, inovasi manajemen anggaran melalui kombinasi dana nagari dengan swadaya masyarakat, di mana alokasi upah tenaga kerja dialihkan untuk pembelian

bahan bangunan sehingga jangkauan fisik pembangunan menjadi lebih luas. Ketiga, pengelolaan sisa anggaran secara optimal agar setiap rupiah dapat dimanfaatkan tanpa terbuang sia-sia.

Inovasi ini sejalan dengan pandangan Susanto dalam (Najib et al., 2022) bahwa inovasi adalah pemanfaatan ide-ide baru untuk menghasilkan produk, proses, dan layanan yang lebih baik. Begitupula (Pangkey, 2024) menegaskan bahwa pemerintah desa berkewajiban mendorong perubahan melalui berbagai inisiatif dengan tetap mendorong kemandirian masyarakat. Menariknya, gagasan inovasi di Nagari Tanjung Barulak sepenuhnya berasal dari aspirasi masyarakat, sehingga mencerminkan model agen pembaharuan yang bersifat bottom-up dan partisipatif.

3. Peran Pemerintah Nagari sebagai Modernisator

Siagian menegaskan bahwa modernisator berarti pemerintah harus mendorong transformasi masyarakat menuju cara-cara yang lebih modern dan sistematis tanpa meninggalkan nilai-nilai lokal yang positif. Pemerintah Nagari Tanjung Barulak telah memperlihatkan peran ini melalui penerapan dokumen perencanaan terstruktur (RPJM Nagari dan RKP Nagari), penyusunan RAB berbasis survei lapangan, keterlibatan tenaga ahli eksternal, serta penerapan transparansi anggaran melalui papan informasi publik dan mekanisme pra-kegiatan. Keberhasilan peran ini terletak pada kemampuan pemerintah nagari mengintegrasikan sistem modern dengan nilai-nilai adat Minangkabau. Proses musyawarah mufakat tetap dipertahankan sebagai basis legitimasi setiap keputusan pembangunan, sehingga modernisasi tidak menimbulkan resistensi dari masyarakat.

Temuan ini selaras dengan (Martono, 2018) yang memandang modernisasi sebagai upaya perubahan yang diarahkan pada masyarakat tradisional menuju pola yang lebih maju, serta sejalan dengan penelitian (Rosana, 2016) yang menyatakan modernisasi adalah perubahan dari cara tradisional menuju cara baru guna meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian, modernisasi di Nagari Tanjung Barulak tidak hanya terjadi pada aspek fisik, tetapi juga pada sistem perencanaan, pelaksanaan, dan tata kelola pemerintahan yang semakin profesional.

4. Peran Pemerintah Nagari sebagai Pelopor

Siagian mengemukakan bahwa pelopor berarti pemerintah harus menjadi teladan dan penggerak awal dalam proses pembangunan, bukan sekadar menunggu inisiatif dari pihak lain. Pemerintah Nagari Tanjung Barulak menjalankan peran ini melalui keterlibatan langsung

aparatur nagari di lapangan sejak tahap survei, penyusunan RAB, pelaksanaan, hingga monitoring berkala. Evaluasi formal dilaksanakan ketika pekerjaan mencapai 50 persen dengan melibatkan tim nagari, pihak kecamatan, dan pendamping desa.

Peran pelopor juga tercermin dalam upaya aktif pemerintah nagari menggerakkan partisipasi masyarakat melalui pendekatan berbasis tokoh. Dengan melibatkan niniak mamak dan kepala jorong sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah nagari berhasil mendorong keterlibatan warga dalam gotong royong. Ini selaras dengan pandangan Siagian dan juga beberapa lainnya seperti (Revida et al., 2021); (Afandi et al., 2022) bahwa pelopor baik dari tokoh dan pemerintah yang efektif mampu menggerakkan potensi masyarakat, bukan hanya mengandalkan kekuatan birokrasi. Penelitian (Sutrisno, 2015) juga menegaskan bahwasanya peran pemerintah atau lembaga yang memiliki perencanaan maksimal akan membentuk suatu inovasi perkembangan desa atau pemerintah yang baik dan maju serta sesuai dengan kebutuhan zamannya.

5. Peran Pemerintah Nagari sebagai Pelaksana

Siagian menyatakan bahwa pelaksana bertanggung jawab mengorganisir dan mengimplementasikan program pembangunan secara efektif dan akuntabel. Pemerintah Nagari Tanjung Barulak mewujudkan peran ini dalam dua dimensi sekaligus: sebagai pengelola anggaran yang akuntabel dan sebagai pengawas pelaksanaan teknis. Pelaksanaan teknis diserahkan kepada masyarakat melalui sistem swakelola yang diorganisir oleh TPK, dengan Kepala Jorong sebagai ketua atau anggota TPK untuk menjamin keterwakilan wilayah. Hal ini sejalan dengan pandangan (Surono, 2019) bahwa kepala desa berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Boateng, Molla, dan Hinson dalam (Agusalim et al., 2022) menegaskan bahwa pelaksanaan merupakan tindakan merealisasikan rencana yang telah dirumuskan secara matang, sebagaimana tercermin dari proses penyusunan RAB berbasis survei lapangan sebelum pelaksanaan dimulai.

Perubahan paradigma dari sistem bagi rata ke sistem prioritas berbasis kebutuhan merupakan bukti konkret peran pelaksana yang semakin matang. Hal ini sejalan menurut (Sarkawi, 2022) yang menegaskan bahwa kepala desa adalah aktor kunci dalam pembangunan desa, yang dalam konteks ini dibuktikan melalui kemampuan mendelegasikan pelaksanaan teknis kepada masyarakat tanpa melepas tanggung jawab pengawasan. Selain itu, studi oleh (Nugroho, 2021) menegaskan bahwa implementasi kebijakan yang efektif di tingkat lokal

sangat bergantung pada kemampuan aktor pelaksana dalam mengoordinasikan sumber daya dan memastikan akuntabilitas publik tetap terjaga terutama terhadap prioritas penerima tertentu. Dengan sistem prioritas tersebut, pembangunan menjadi lebih berkualitas dan tepat sasaran, sesuai prinsip Siagian bahwa pelaksana yang baik berorientasi pada hasil optimal, bukan sekadar pemenuhan prosedur administratif.

Dalam (Al Farizi & Anshori, 2024) menetapkan bahwa tersedianya infrastruktur fisik dan sosial yang merata merupakan salah satu sasaran umum pembangunan pedesaan. Dalam pelaksanaannya, setiap jorong mengidentifikasi lima permasalahan paling mendesak yang kemudian dipilah berdasarkan urgensi dalam Musrenbang Nagari, dituangkan dalam RKP Nagari, dan dilaksanakan secara bertahap dengan rotasi sekitar tiga jorong per tahun. Sistem ini mencerminkan prinsip keadilan distributif serta pendekatan bottom-up planning (Todaro & Smith, 2015); (Muminah & Suprajogo, 2025). Meskipun demikian, sebagian jorong masih harus menunggu cukup lama akibat keterbatasan anggaran, yang menjadi tantangan struktural yang perlu mendapat perhatian serius dari semua pemangku kepentingan.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Peran Pemerintah Nagari dalam Pembangunan Fisik

Pertama adalah faktor pendukung. Faktor pendukung dapat dikategorikan menjadi internal dan eksternal. Faktor internal utama adalah sinergi kelembagaan tungku tigo sajarangan yang memadukan unsur pemerintahan modern (wali nagari dan perangkat nagari), kelembagaan adat (KAN dan niniak mamak), serta lembaga representatif masyarakat (BPRN). Sinergi ini menghasilkan legitimasi ganda secara formal administratif maupun sosial-budaya, sehingga kebijakan pembangunan lebih mudah diterima dan diimplementasikan. Semangat gotong royong dan swadaya masyarakat, termasuk aktivasi jaringan perantau nagari sebagai sumber pendanaan tambahan, juga terbukti mampu mengoptimalkan hasil pembangunan di tengah keterbatasan anggaran. Hal ini sejalan dengan (Adisasmita, 2013) yang menekankan bahwa pembangunan desa bertumpu pada semangat kebersamaan dan swadaya sebagai kekuatan endogen. Menurut kerangka sebagaimana Arif jelaskan dalam (Prasojo & Fauziah, 2015), partisipasi aktif masyarakat merupakan hasil dari fungsi katalisator pemerintah nagari yang berhasil mendorong kontribusi warga dalam pembangunan.

Faktor pendukung eksternal meliputi dukungan instansi teknis seperti PMD/PPKB di tingkat kabupaten, keberadaan perencana kegiatan yang kompeten, serta ketersediaan RAB

yang terstruktur. Dukungan ini mencerminkan berjalannya fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan UU Nomor 6 Tahun 2014, sekaligus berkontribusi pada modernisasi tata kelola pembangunan nagari. Penelitian oleh (Ginting et al., 2024) menunjukkan bahwa dukungan kelembagaan dan kapasitas teknis dari pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas perencanaan pembangunan desa berbasis kebutuhan masyarakat. Selain itu, studi lain oleh (Lobbu et al., 2017) dan (Majayanti et al., 2023) menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan desa dalam aspek pembinaan teknis dan pengawasan mampu mendorong praktik tata kelola yang lebih modern dan adaptif terhadap tuntutan pembangunan partisipatif. Dengan demikian, keberadaan faktor eksternal tersebut menjadi elemen kunci dalam memastikan bahwa proses pembangunan nagari tidak hanya berjalan sesuai prosedur, tetapi juga menghasilkan output yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Kedua adalah faktor penghambat. Hambatan yang dihadapi bersifat multidimensional: teknis, struktural, dan kultural. Hambatan teknis meliputi keterlambatan pencairan dana, kendala pembebasan lahan, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara infrastruktur. Hambatan struktural terberat adalah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang menyebabkan seluruh program pembangunan fisik tahun 2026 terpaksa ditangguhkan. Hambatan kultural mencakup persoalan tanah pusaka adat dalam proses pembebasan lahan.

Persoalan pemeliharaan infrastruktur perlu mendapat perhatian serius. Kuncoro dalam (Nababan et al., 2025) menegaskan bahwa pembangunan fisik bukan hanya soal membangun infrastruktur baru, tetapi juga memastikan keberlanjutan fungsinya. Ketika kesadaran pemeliharaan rendah dan belum tersedia RAB khusus untuk pemeliharaan, investasi pembangunan fisik berisiko tidak memberikan manfaat jangka panjang yang optimal. Dengan itu maka pentingnya pengelolaan kerjasama antar desa pemerintah dan juga lembaga lainnya termasuk peran tokoh masyarakat (Taqiyah et al., 2023), sehingga dengan hal tersebut, Penanganan hambatan-hambatan tersebut tidak dapat dilakukan secara parsial oleh pemerintah nagari semata, melainkan memerlukan kolaborasi komprehensif antara pemerintah nagari, pemerintah kabupaten, lembaga adat, dan seluruh komponen masyarakat agar peran pemerintah nagari dalam pembangunan fisik dapat semakin efektif dan berdampak nyata.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, pemerintah Nagari Tanjung Barulak telah menjalankan kelima peran pembangunan menurut teori Siagian secara keseluruhan, meskipun dengan tingkat efektivitas yang berbeda-beda. Peran pemerintah Nagari Tanjung Barulak yang paling dominan adalah sebagai stabilisator dan pelaksana. Peran stabilisator terlihat dari efektivitas mekanisme musyawarah berjenjang yang mampu menjaga kondisi sosial tetap kondusif tanpa konflik, sedangkan peran pelaksana tercermin dari kemampuan pemerintah nagari dalam mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan secara partisipatif melalui pelibatan masyarakat (TPK) serta penerapan sistem prioritas berbasis kebutuhan. Sementara itu, peran yang masih perlu diperkuat adalah peran inovator, modernisator, dan pelopor, terutama dalam pemanfaatan teknologi tata kelola dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan hasil pembangunan. Peran pemerintah Nagari Tanjung Barulak dalam pembangunan fisik dipengaruhi oleh Faktor pendukung yang meliputi sinergi kelembagaan tungku tigo sajarangan (KAN, BPRN dan Perangkat Nagari), semangat gotong royong dan swadaya masyarakat, serta dukungan teknis dari instansi kabupaten dan tenaga ahli. Sementara itu, faktor penghambat mencakup keterlambatan pencairan dana, kendala pembebasan lahan adat, rendahnya kesadaran pemeliharaan infrastruktur, faktor cuaca, serta kebijakan efisiensi anggaran.

Penelitian ini memberikan tiga kontribusi utama terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Secara teoritis, studi ini memperkuat relevansi teori peran pemerintah Siagian dalam konteks pemerintahan nagari di Sumatera Barat dengan menunjukkan bahwa kelima peran stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana dapat dioperasionalisasikan pada level pemerintahan terendah yang memiliki kekhasan kelembagaan adat. Secara empiris, penelitian ini menghasilkan bukti lapangan bahwa kelima peran tersebut tidak berjalan seragam peran stabilisator dan pelaksana terbukti lebih efektif dibandingkan peran inovator yang masih bersifat reaktif. Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa sinergi kelembagaan tungku tigo sajarangan dan semangat gotong royong masyarakat merupakan modal sosial yang terbukti mampu mengoptimalkan pembangunan fisik di tengah keterbatasan anggaran, sekaligus menawarkan model tata kelola pembangunan berbasis kearifan lokal yang dapat menjadi referensi bagi nagari-nagari lain di Sumatera Barat.

Rekomendasi untuk studi lanjutan. 1) perluasan penelitian menggunakan desain komparatif antarnagari dengan karakteristik geografis dan kelembagaan yang berbeda untuk meningkatkan generalisasi temuan. 2) penelitian lanjutan perlu mengkaji secara khusus model pembiayaan alternatif pembangunan nagari yang tidak bergantung sepenuhnya pada dana pemerintah pusat, mengingat temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dari pusat dapat melumpuhkan seluruh program pembangunan fisik nagari dalam satu tahun anggaran. 3) studi tentang efektivitas sistem pemeliharaan infrastruktur berbasis komunitas perlu dilakukan sebagai tindak lanjut atas temuan rendahnya kesadaran masyarakat dalam merawat hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.

Adisasmita, R. (2013). *Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Graha Ilmu.

Afandi, S. A., Afandi, M., & Erdayani, R. (2022). *Pengantar Teori Pembangunan*. Bintang Semesta Media.

Agusalim, Amir, M., & Jopang. (2022). Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Desa di Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan. *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik, 13*(2), 146–158. https://journal.uho.ac.id/index.php/publica/article/view/191/60

Al Farizi, F., & Anshori, M. I. (2024). Studi Literatur Review: Manajemen Infrastruktur. *Student Scientific Creativity Journal, 2*(4), 211–221. https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v2i4.3589

Ginting, G., Kuswandi, A., & Budiati, A. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Kandui: Faktor Pengaruh dan Tantangan. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6*(1), 112–129. https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/1084

Karinda, K., Kede, A., Septiana, G. L., Jayalangi, L. O. S., Sibay, S., & Ulfa, M. (2024). Integrasi Komunikasi Pemerintahan Digital Melalui Situs Web Resmi: Studi Kasus di Desa Tontouan, Kecamatan Luwuk. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 5*(2), 1–13. https://villages.pubmedia.id/index.php/villages/article/view/110

Lobbu, D. N., Lengkong, F. D., & Pombengi, J. D. (2017). Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Dodap Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal Administrasi Publik, 4*(1), 49–62. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/18440

Majayanti, D., Hariadi, B., & Adnani, A. (2023). Peranan Pemerintahan Nagari Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Di Nagari Persiapan Bandua Balai Kabupaten Pasaman Barat. *JAPan: Jurnal Administrasi Dan Pemerintahan, 1*(1), 66–74. https://doi.org/10.55850/japan.v1i1.72

Martono, N. (2018). *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*. RajaGrafindo Persada.

Moleong, L. J. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Muminah, S., & Suprajogo, T. (2025). Implementasi Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Pendekatan Bottom-Up. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management, & Business, 8*(4), 1485–1495. https://www.ojspustek.org/index.php/SJR/article/view/1253

Nababan, S. S., Sihombing, N. E., Degodona, P., & Rajagukguk, J. (2025). Analisis Kinerja Kepala Desa dalam Melaksanakan Otonomi Daerah di Desa Nagasaribu IV Kecamatan Lintongnihuta. *Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan, 11*(3), 121–133. https://governance.lkispol.or.id/index.php/description/article/view/383

Najib, M. F., Februadi, A., Djarnika, T., Rafdinal, W., Lasambouw, C. M., & Nuryati, N. (2022). Inovasi Desain Kemasan (Packaging) sebagai Faktor Peningkatan Daya Saing Produk UMKM di Desa Ciwarua, Kabupaten Bandung Barat. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 6*(1), 56–64. https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i1.8397

Nugroho, R. (2021). Public policy implementation and governance in developing countries. *Jurnal Administrasi Pengembangan Desa, 3*(2), 217–234.

Pangkey, I. (2024). *Administrasi Pemerintahan Desa*. Tahta Media Group.

Prasojo, R. A., & Fauziah, L. (2015). Peran Pemerintah-Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik), 3*(1), 49–64. https://jkmp.umsida.ac.id/index.php/jkmp/article/view/1616

Rachaju, K., Hikmat, A., & Abdurrahman, M. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Desa. *Jurnal Soshum Insentif, 5*(2), 168–175. https://doi.org/10.36787/jsi.v5i2.867

Revida, E., Purba, S., Kusumawati, I., Saragih, H., Zatira, D., Lisnawati, T., Hidayat, Firmansyah, H., Ernawati, T., Siregar, R. T., & Yudaningsih, N. (2021). *Manajemen Pembangunan Wilayah: Strategi dan Inovasi*. Insania Arini Novandalina.

Rosana, E. (2016). Modernisasi dan Perubahan Sosial. *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 12*(1), 152–155. https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan/article/view/1423

Sarkawi. (2022). *Hukum Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Mataram University Press.

Siagian, S. P. (2014). *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Bumi Aksara.

Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan, 5*(2), 295–302. https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/1465

Sugiyono. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Surono. (2019). *Manajemen Pemerintahan Desa*. Pustaka Pelajar.

Sutrisno, M. R. D. S. (2015). Inovasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Layanan Cetak Tiket Mandiri di Stasiun Besar Malang). *JAPB: Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik, 3*(11), 290–297. https://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/1050

Taqiyah, Z., Isnaini, & Wahyuni, Y. S. (2023). Peran Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. *Jurnal Sosiologi,* *6*(2), 17. https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JSOS/article/view/8306

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development*. Pearson Education.

Zakir, F. (2021). Mengenal Sistem Pemerintahan Nagari di Provinsi Sumatera Barat. *Ensiklopedia of Journal,* *3*(5), 53–57. https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/183